



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI PAPUA BARAT**

**RESES MASA PERSIDANGAN II
TAHUN SIDANG 2016-2017**

**KOMISI VII
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2016**

BAGIAN I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan DPR RI No.1/DPRRI/I/2014-2019 tentang Tata Tertib, maka Komisi VII DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016 - 2017 telah membentuk 3 (dua) Tim Kunjungan Kerja (Kunker), yaitu ke Provinsi Jambi, Propinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua Barat.

Pemilihan provinsi Papua Barat sebagai salah satu tujuan Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI, diantaranya *pertama* banyaknya isu strategis yang perlu segera diselesaikan diantaranya *pertama* program Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga yang dinstruksikan oleh Presiden RI diseluruh wilayah Indonesia, pasokan dan distribusi BBM. *Kedua*, program Papua Terang, sistem ketenagalistrikan dari pembangkit, transmisi dan distribusi. Persolan kelistrikan lainnya adalah masih banyaknya daerah di kawasan Indonesia Bagian Timur yang belum bisa menikmati listrik. *Ketiga*, persoalan pengelolaan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Komunal di Manokwari pasca *on grid* dengan transmisi PT PLN (Persero). Keempat.

Papua Barat adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di ujung barat Pulau Papua. Ibukotanya adalah Manokwari. Nama provinsi ini sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tanggal 18 April 2007, nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat. Papua Barat dan Papua merupakan provinsi yang memperoleh status otonomi khusus.

Secara geografis, wilayah Provinsi Papua Barat sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Papua, sebelah Selatan berbatasan dengan laut Banda, sebelah Barat berbatasan dengan laut Seram, Provinsi Maluku, sebelah Utara berbatasan dengan Samudera Pasifik (sumber: wikipedia)

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam, baik itu berupa hutan, mineral, minyak dan gas bumi, maupun kekayaan alam perairannya. Pengelolaan sumber daya alam tersebut tentu menimbulkan berbagai dampak, baik itu dampak positif, ataupun negatif. Dampak positifnya adalah meningkatnya penerimaan daerah dari hasil pemanfaatan sumber daya alamnya. Selain itu dengan pembangunan di berbagai sektor, juga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Adapun dampak negatifnya adalah terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Tanah. Topografi wilayah Provinsi Papua Barat sangatlah bervariasi. Wilayahnya berupa dataran hingga pegunungan dengan puncak-puncak yang tinggi. Lembah-lembah yang datar tersebar di sekitar Teluk Bintuni, Isim, Prafi, Warsamson, Wosimi dan Arguni. Sementara itu, kelompok pegunungan dengan puncaknya yang mencapai 3.000 meter diatas permukaan laut diantaranya Pegunungan Arfak, Tambrau, Kumawa, Fak-fak, dan Wondiwoi. Dan berikut kami sajikan tabel topografi luas kemiringan lahan di Provinsi Papua Barat.

Jenis Lahan	Kemiringan (%)	Luas (Ha)
Bergelombang	3-15	2.524.944
Curam	16-40	2.795.754
Sangat Curam	>40	5.556.300

Sumber: Profil daerah provinsi Papua Barat, 2005

Banyak lahan di kawasan Provinsi Papua Barat yang belum dimanfaatkan secara optimal. Selain digunakan sebagai sawah, lahan tersebut juga digunakan sebagai ladang/tegal seluas 340.275 Ha, perkebunan seluas 125.135 Ha, pemukiman seluas 121.403 Ha, usaha lain seluas 332.688 Ha, danau atau telaga seluas 4.531 Ha, dan tanah tandus atau tanah rusak seluas 82.197 Ha.

Secara geologis wilayah Provinsi Papua Barat memiliki potensi mineral yang melimpah. Walaupun demikian penyebarannya tidak merata. Penyebaran mineral yang tidak merata ini karena tidak meratanya penyebaran jenis batuan. Kondisi tektonik wilayah dan umur batuan sangat

menentukan jenis mineral. Di wilayah kepala burung diperkirakan terkandung sumber daya mineral yang berasal dari umur batuan tersier. Sumber daya mineral tersebut misalnya gas bumi dan batu bara yang ada di cekungan Bintuni. Sementara itu, sumber daya emas terdapat di Aifat, uranium di Manokwari, minyak bumi di Sorong dan Raja Ampat.

Air. Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang memiliki banyak kekayaan laut. Kekayaan laut tersebut berupa bahan tambang, mutiara, keindahan karang dan berbagai jenis ikan. Salah satu kawasan perairan yang menjadi andalan Provinsi Papua Barat adalah perairan yang terdapat di Kepulauan Raja Ampat.

Kekayaan dan keanekaragaman hayati di Raja Ampat telah membuat provinsi ini memiliki tingkat ancaman yang tinggi pula. Hal itu bisa dilihat dari kerusakan terumbu karang dan hutan. Kerusakan terumbu karang umumnya adalah karena aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu, untuk menjaga kelestarian bawah laut Kepulauan Raja Ampat, usaha-usaha konservasi sangat diperlukan (sumber:lpapebia.web.id)

1.2. DASAR KUNJUNGAN

Dasar Hukum dari pelaksanaan Kunker Masa Reses adalah hasil Keputusan Rapat Komisi VII DPR RI tentang agenda kerja Masa Persidangan II Tahun Sidang 2016-2017 dengan dasar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan merujuk pada Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1/DPR RI/I/2014 tentang Tata Tertib DPR RI.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN KUNJUNGAN

Maksud diadakannya Kunker Masa Reses Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat adalah untuk menyerap aspirasi, mendapatkan data dan informasi secara langsung tentang perkembangan di provinsi Papua Barat khususnya yang terkait dengan energi dan sumber daya mineral,

ketenagalistrikan, lingkungan hidup serta riset dan teknologi. Adapun tujuan Kunker adalah mendapatkan data dan informasi yang valid serta memberikan solusi dan alternatifnya terkait persoalan energi dan lingkungan hidup di provinsi Papua Barat. Dimana hasil Kunker ini akan digunakan sebagai bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI dalam menjalankan peran dan fungsinya, khususnya di bidang pengawasan, *budgeting* dan legislasi dibidang sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

1.4. AGENDA PERTEMUAN

Agenda pertemuan Kunker ke Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- a. Pertemuan dengan Gubernur, DPRD, Dinas Pertambangan Pemerintah Provinsi Papua Barat. Agenda ini tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Gubernur Papua Barat.
- b. Pertemuan dengan direksi/manajemen PT Pertamina (persero), Kementerian Lingkungan Hidup serta BPH Migas.
- c. Kunjungan lapangan ke PLTS Komunal 1 MW di Manokwari bersama Direktur EBTKE Kementeraian ESDM, Manajemen PT PLN (persero) dan PT LEN
- d. Pertemuan dengan direksi/manajemen PT PLN (Persero), Direktorat Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Kementerian Lingkungan Hidup
- e. Pertemuan dengan Wakil Kepala SKK Migas dan manajemen KKKS diantaranya Pertamina EP, JOB Pertamina-Petrochina, Petrogas dan BP Berau.

1.5. SUSUNAN ANGGOTA TIM KUNJUNGAN KERJA

Anggota Tim Kunker Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat berjumlah 17 (tujuhbelas) Anggota, dibantu 1 (satu) orang tenaga ahli, 3 (tiga) orang staf sekretariat dan 1 (satu) orang dari TV Parlementaria. Daftar selengkapnya tertera pada Tabel di bawah ini.

**DAFTAR NAMA ANGGOTA
KUNJUNGAN KERJA KOMISI VII DPR RI
KE PROVINSI PAPUA BARAT
RESES MASA PERSIDANGAN II TAHUN SIDANG 2016-2017
TANGGAL 16 s/d 20 DESEMBER 2016**

NO.	NAMA	NO. ANGG	FRAKSI	JABATAN
1.	H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si	120	F.PKS	KETUA TIM
2.	Ir. NAZARUDIN KIEMAS	134	F.PDI-P	ANGGOTA
3.	Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO	170	F.PDI-P	ANGGOTA
4.	AWANG FERDIAN HIDAYAT	222	F.PDI-P	ANGGOTA
5.	TONY WARDOYO	231	F.PDI-P	ANGGOTA
6.	H.N. FALAH AMRU, SE	203	F.PDI-P	ANGGOTA
7.	Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	290	F.PG	ANGGOTA
8.	BAMBANG ATMANTO WIYOGO, SE	250	F.PG	ANGGOTA
9.	KATHERINE A. OENDOEN	382	F.GERINDRA	ANGGOTA
10.	RAMSON SIAGIAN	362	F.GERINDRA	ANGGOTA
11.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT.	481	F.PAN	ANGGOTA
12.	LUCKY HAKIM	474	F.PAN	ANGGOTA
13.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	83	F.PKB	ANGGOTA
14.	H. JOKO PURWANTO	515	F.PPP	ANGGOTA
15.	Ir. FIRMANSYAH MARDANOES	537	F.PPP	ANGGOTA
16.	Dr. KURTUBI, SE, M.Sp, M.Sc	26	F.NASDEM	ANGGOTA
17.	MUHAMMAD FARID AL FAUZI	555	F.HANURA	ANGGOTA

BAGIAN II

HASIL PERTEMUAN

1.1. PERTEMUAN DENGAN GUBERNUR PAPUA BARAT

Tidak ada pertemuan karena ketidakhadiran Gubernur. Tim Kunker Komisi VII DPR RI hanya diterima oleh asisten III bidang ekonomi dan pembangunan pemerintah provinsi Papua Barat.

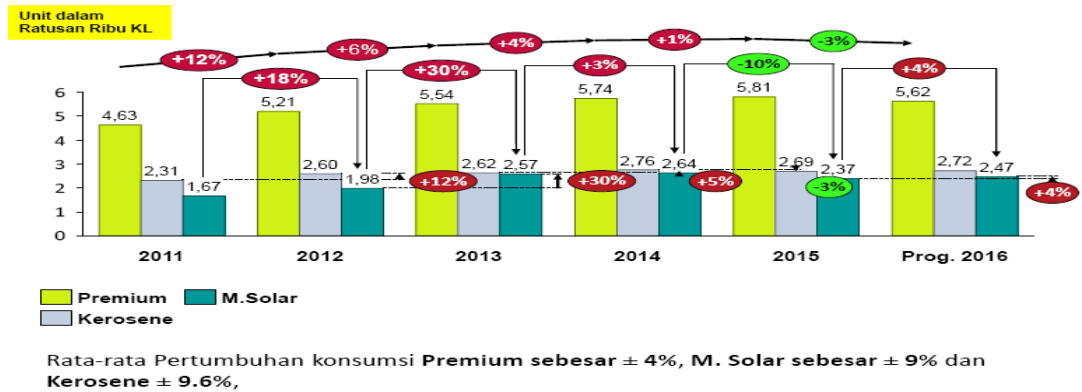
1.2. PERTEMUAN DENGAN MANAJEMEN PT PERTAMINA (PERSERO) MARKETING OPERATION REGION (MOR) VIII

Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh anggota Komite BPH Migas dan staf ahli Menteri Lingkungan Hidup.

A. Data dan informasi

Daerah operasional MOR VIII meliputi provinsi Maluku (TBBM Saumlaki, TBBM Wayame, TBBM Tual, TBBM masehi, TBBM namlea dan TBBM , Maluku Utara (TBBM Tobelo, TBBM Ternate TBBM Labuha, Papua (TBBM Kaimana, TBBM Dobo, TBBM Jobber Timika, TBBM Nabire, TBBM Serui, TBBM Biak dan Papua Barat meliputi TBBM Fak-Fak, TBBM Sorong, TBBM Manokwari.

Pada tahun 2016 rata-rata Pertumbuhan konsumsi di MOR VIII untuk jenis Premium sebesar $\pm 4\%$, M. Solar sebesar $\pm 9\%$ dan Kerosene $\pm 9.6\%$. *Sales growt* selengkapnya tertera pada diagram di bawah ini.



CONFIDENTIAL AND PROPRIETARY

Sedangkan, penjualan BBM industri didominasi oleh PLN dengan share 58% kemudian diikuti oleh sektor Pertambangan (25 %) dan Perkebunan (3%). Penjualan BBM industri khusus provinsi Papua Barat pada tahun 2016 sebesar 11.890 KL per bulan sementara di Papua sebesar 47.020 KL per bulan.

Provinsi Papua Barat masih menggunakan minyak tanah karena belum ada program konversi BBM ke gas. Dimana harga BBM per liter bisa mencapai kisaran Rp 7000 s/d 50.000. Hal ini akibat biaya distribusi BBM sangat mahal karena faktor geografis. Untuk program BBM satu harga maka harga jual BBM ke konsumen adalah Rp 6.450 per liter untuk jenis Premium dan Solar sebesar Rp 5.150 per liter.

Moda transportasi BBM hingga sampai ke APMS adalah mobil tangki, tongkang, dan air tractor.

Biaya distribusi BBM per bulan di Papua dan Papua barat adalah Rp 39,78 miliar sedangkan untuk Maluku dan Maluku Utara sebesar Rp 18,71 miliar per bulan. Biaya tersebut menjadi tanggungjawab PT Pertamina (Persero).

B. Persoalan

Kendala pendistribusian BBM di provinsi Papua Barat adalah kondisi geografis yang sangat berat serta masih kurangnya APMS (Agen Penyalur Minyak dan Solar). Implikasinya biaya distribusi BBM di Papua Barat sangat mahal. Untuk daerah terpencil pendistribusian

dilakukan dengan moda transportasi air tractor. Kendala BBM satu harga di Papua Barat adalah

- Daerah terpencil belum mempunyai APMS
- Infrastruktur jalan yang minim
- Pembangunan APMS tidak ekonomis sehingga membutuhkan subsidi margin.

Jumlah lembaga penyalur BBM di Papua Barat untuk agen minyak tanah sebanyak 15 agen, SPBU sebanyak 11 unit, APMS sebanyak 31 unit, SPBN sebanyak 1 unit dan SPDN sebanyak 11 unit. Supply BBM dari Kalimantan (Bontang) dan seringkali terkendala cuaca.

C. Usulan Solusi

Untuk menjamin ketersediaan BBM, efektivitas dan efisiensi biaya distribusi BBM di Papua dan Papua Barat sebaiknya supply BBM dialihkan dari kilang Bontang ke kilang Kasim. Karena itu perlu dilakukan revitalisasi dan optimalisasi kilang mini Kasim dengan meningkatkan kapaistas kilang kasim dari kapasitas terpasang sebesar 10.000 BOPD menjadi 50.000 BOPD atau 100.000 BOPD.

Operasional kapasiata kilang Kasim saat ini hanya 80.000 BOPD. Hali ini disebabkan keterbatasan supply crude oil. Untuk itu Tim Kunker Komisi VII merekomendasikan kepada Pemerintah agar melakukan revitalisasi dan optimalisasi kilang Kasim serta mendesak pemerintah agar produksi crude dari Pertamina Salawati sebesar 1200 BOPD, JOB Pertamina-Petrochina dan Mondor sebesar 1500 BOPD digunakan untuk kebutuhan kilang Kasim.

Untuk menunjang keberhasilan program BBM satu harga maka

- Pemerintah wajib menugaskan PT Pertamina (Persero) untuk memperbanyak APMS diseluruh wilayah Papua Barat
- Perlu perhitungan margin yang berbeda antar APMS terutama didaerah terpencil.
- Perlu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah terpencil.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut maka PT Pertamina (Persero) rencananya akan membangun TBBM di Wamena namun implementasinya masih dikalkulasi mengingat Wamena termasuk daerah rawan konflik.

1.3. KUNJUNGAN KE PLTS MANOKWARI

A. Data dan Informasi

Biaya pembangunan PLTS Komunal 1 MW di Manokwari RP 60 miliar tidak termasuk biaya lahan

PLTS ini menggunakan teknologi dari Germany dan dimandatorikan dari Pemerintah kepada PT Len

PLTS ini nantinya akan *on grid* dengan jaringan transmisi PLN sementara jaminan sistem-nya selama 1 tahun sedangkan jaminan teknologi adalah 5 tahun. Berikut adalah gambar peninjauan langsung ke PLTS Komunal 1 MW di Manokwari



B. Persoalan Pengembangan PLTS

Klaim lahan adat oleh masyarakat menjadi persoalan tersendiri bagi pembangunan PLTS komunal di Papua Barat. Selain itu, PLTS Komunal 1 MW Manokwari belum dilengkapi dengan *storage/battery* sehingga berpotensi terjadi gangguan mengingat radiasi pancaran sinar matahari seringkali terkendala awan.

Jika PLTS ini sudah *on grid* maka persoalan teknis lainnya adalah kemampuan SDM dalam maintenance. Karena itu perlu dilakukan

pelatihan khusus sehingga kemampuan operatornya menjadi teruji. Kendala lainnya adalah harga jual per kwh dari produk listrik energi baru terbarukan yang masih relatif mahal. Hal ini menjadi kendala bagi PT PLN (Persero)

C. Usulan Solusi

Pemerintah harus segera menyelesaikan Peraturan Menteri ESDM yang secara khusus mengatur harga jual produk listrik energi baru terbarukan (EBT) termasuk dari PLTS yang dibangun oleh BUMN.

PLTS 1 MW Manokwari harus dilengkapi dengan storage/battery mengingat radiasi sinar matahari di daerah Manokwari beresifat fluktuatif atau diskontinu akibat terhalang oleh awan.

1.4. PERTEMUAN DENGAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)

A. Data dan informasi kelistrikan di Papua Barat

Struktur organisasi PLN di Papua Barat terdiri dari 1 UIP (Unit Induk Pembangunan) yang terdiri dari dua area yaitu area Manokwari dan area Sorong. Untuk menunjang keberhasilan program Papua terang, diperlukan perluasan struktur area mengingat geografis Papua Barat yang begitu luas

Kondisi kelistrikan di Papua Barat secara teknis tidak defisit hanya saja *reserve margin* relatif kecil sehingga berpotensi terjadinya gangguan kelistrikan (pemadaman bergilir). *Reserve margin* di Sorong sebesar 10 %, Fak-Fak sebesar 5 % dan Teluk Wondame sebesar 1% sedangkan *reserve margin* yang aman sebesar 30 % dari total kapasitas terpasang.

Rasio elektrifikasi di Papua Barat pada tahun 2015 relatif tinggi yaitu sebesar 66,67 %. Data rasio elektrifikasi selengkapnya tertera pada Tabel di bawah ini.

NO.	URAIAN	SAT	PROV. PAPUA	PROV. PAPUA BARAT	
			2015	2015	2016*
1	Pelanggan Total	Plg	339,908	161,061	173,783
2	Pelanggan Rumah Tangga	Plg	307,227	122,826	156,778
3	Jumlah Rumah Tangga	RT	732,033	192,452	196,612
4	Rasio Elektrifikasi	%	41.97	63.82	79.74
5	Jumlah Desa	Desa	3,546	1,366	1,366
6	Desa Berlistrik	Desa	766	329	399
7	Rasio Desa Berlistrik	%	21.60	24.08	29.21
8	Kecamatan	Kec	384	161	161
9	Kecamatan Berlistrik	Kec	118	56	66
10	Rasio Kecamatan Berlistrik	%	30.73	34.78	40.99
11	Kabupaten/ Kotamadya	Kab	29	13	13
12	Kabupaten Berlistrik	Kab	19	9	12
13	Rasio Kabupaten Berlistrik	%	65.52	69.23	92.31

Komposisi pembangkit masih didominasi oleh PLTD sebanyak 90% dari total pembangkit yang ada dengan BBM sebagai bahan bakarnya. PLTD merupakan pilihan optimal karena letak daerah di Papua Barat yang terpencil-pencil dengan kontur yang berbukit-bukit.

Sedangkan (Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik per kwh di Papua Barat Pada pada tahun 2016 sebesar Rp 1.939,4. BPP ini relatif rendah jika dibandingkan dengan daerah Timur Indonesia lainnya. Hal ini dikarenakan komposisi energinya didominasi oleh gas yaitu sebesar 54% dari total energi bahan bakar pembangkit.

Perkembangan energi baru terbarukan selain air atau PLTA adalah PLTS Komunal dan non komunal.

Sementara distribusi listrik di Papua Barat masih rendah karena masih ada 2.500 Desa yang belum terlayani listrik oleh PLN. Karena itu PLN melakukan Kerjasama Operasi (KSO) dengan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi persoalan tersebut.

B. Persoalan Ketenaglistrikan

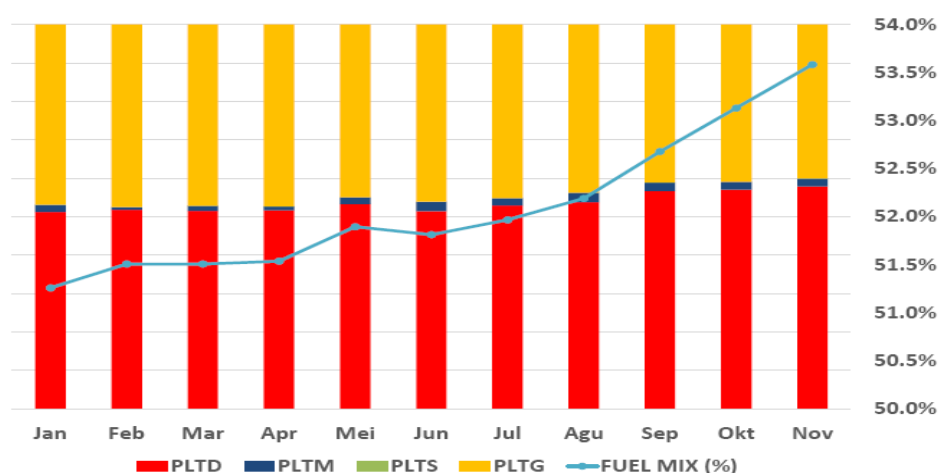
Pengembangan PLTA terkendala dengan tingginya sedimentasi akibat adanya lahan kelapa sawit. Kondisi ini akan sangat mengganggu kontinuitas tekanan air pada saat musin penghujan karena bercampur dengan lumpur.

Kendala PLTD di daerah terpencil adalah ongkos angkut BBM yang sangat mahal. Biaya angkut BBM untuk PLTD di daerah terpencil dengan menggunakan air tractor sebesar Rp 8000 per liter – Rp 21.000 per liter. Hal ini akan berimplikasi pada tingginya BPP per kwh. Untuk program listrik desa PLN masih mengandalkan PLTD sebagai sistem pembangkitannya.

PT PLN (Persero) tidak mempunyai anggaran untuk sambungan listrik RTS (Rumahtangga Sederhana) atau listrik gratis. PLN mengharap kepada Tim Kunker Komisi VII untuk membantu menyelesaikan persoalan RTS. Tabel di bawah ini menunjukkan komposisi pelanggan PT PLN (Persero).

No	URAIAN	JUMLAH PELANGGAN	%
1	PELANGGAN TOTAL	173.783	100
2	PELANGGAN NON RUMAH TANGGA	17.005	9,79
3	PELANGGAN RUMAH TANGGA	156.778	90,21
4	TARIF R 450 VA	49.734	31,72
5	TARIF R 900 VA	41.820	26,67
6	TARIF LAINNYA	65.224	41,60

Sementara komposisi *fuel mix* untuk pembangkit secara lengkap tertera pada diagram di bawah ini:



C. Usulan Solusi

Untuk menunjang program Papua terang maka diperlukan perluasan struktur.

Pembangunan PLTG dengan *supply* gas sebesar 20 mmscfd dari train 3 Tangguh. Rencana PLTG ini bisa direalisasikan pada tahun 2018. Program PLTG dimaksudkan untuk menopang program Papua Terang dan PON 2020 yang rencananya diselenggarakan di Papua tetapi tidak tertutup kemungkinan bersama Papua Barat.

Untuk pemenuhan kebutuhan listrik di Papua Barat, pilihan terbaik selain PLTG adalah pembangunan PLTMH (Pembangkit Listrik Mikro Hydro). Sementara untuk PLTS non komunal untuk daerah terpencil terkendala oleh minimnya sinar matahari. Rata-rata PLTS non komunal hanya bisa beroperasi selama 6 jam dala sehari.

1.5. PERTEMUAN DENGAN WAKIL KEPALA SKK MIGAS DAN OPERATOR KKKS

A. Data umum WK produksi di Berau, Muturi, dan Wiriagar

- Operator : BP Berau Indonesia
- Jangka Waktu Kontrak Kerja Sama Berau PSC ext. 12 Feb. 2017 - 31 Des. 2035
- Muturi PSC (26 Agustus 2022- 31 Des. 2035)
- Wiriagar PSC (27 Feb. 2023 - 31 Des. 2035)

Data umum WK Kasuri, Genting Oil PTE. LTD.

- Realisasi Kegiatan Eksplorasi Sampai Dengan 2015
- Seluruh Program Kerja Komitmen Pasti dan Komitmen Kerja telah terlaksana. Tambahan program : 174.5km² 3D Seismik dan Processing, 343km 2D Seismik dan Processing, dan 2 sumur eksplorasi.
- **Strategi Eksplorasi 2016.** GOKPL akan melanjutkan evaluasi temuan *Tight Gas Reservoir* di batupasir Roabiba dan Ubadari (Bedidi Deep, Rajawali & Foroda) dan mengeksplorasi lebih lanjut temuan gas baru di Formasi Steenkool.

- Mengevaluasi prospektifitas temuan minyak di Kasuri Block.
- Mengevaluasi adanya prospek dan lead baru di Kasuri Block
- **Participation** Genting Oil Kasuri Pte. Ltd. : 100 % (operator)

Tabel cadangan di Kasuri

Cadangan Blok Kasuri		
Lapangan	Volume	Satuan
Asap	1,281	Bscf
Kido	167	Bscf
Merah	287	Bscf
Total	1,735	Bscf

- **Data Proyek Tangguh LNG Train-3.** POD II Tangguh Train 3 disetujui oleh Menteri ESDM selaku Ka. SK Migas pada 2012. Alokasi gas untuk kebutuhan domestic (90 mmscfd pada tahun 2021, dan tambahan 90 mmscfd berikutnya menunggu hasil pengeboran tahun 2019. Alokasi LNG untuk kelistrikan Papua, Papua Barat & Maluku. Untuk menunjang program Papua terang telah dilakukan pre-feasibility study pendistribusian alokasi LNG setara 20 mmscfd untuk kelistrikan Papua, Papua barat, Fak-Fak dan Bintuni. Sementara alokasi gas untuk pembangkitan listrik di Papua sebesar 50 mmscfd sedangkan Maluku sebesar 50 mmscfd. Dan utamanya untuk mendukung program Presiden Republik Indonesia terkait program Papua terang 2019. Sementara penambahan 4 MW untuk Kabupaten Teluk Bintuni sesuai SoA dengan PLN menunggu kesiapan jalur distribusi PLN.

BAGIAN III

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

1. Tim Kunker Komisi VII DPR RI melalui PT Pertamina (Pesero) meminta Pemerintah untuk melakukan revitalisasi dan optimalisasi kilang mini Kasim agar distribusi BBM di Indonesia Timur terjamin ketersediaannya
2. Tim Kunker Komisi VII DPR RI meminta pada Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi distribusi BBM dengan cara lifting minyak bumi di Pertamina EP Salawati, Petrogas dan Mondor digunakan sebagai pemasok Kilang Kasim sehingga distribusi BBM di Indonesia Timur tidak lagi dari Bontang
3. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung program pengembangan listrik energi baru terbarukan di Papua Barat yang dilakukan oleh Pemerintah melalui PT Len.
4. Tim Kunker Komisi VII DPR RI meminta PT Len untuk melengkapi PLTS Komunal 1 MW Manokwari dengan storage/battery karena pancaran sinar matahari di daerah tersebut bersifat fluktuatif akibat terhalang awan.
5. Tim Kunker Komisi VII DPR RI bisa memahami persoalan penyambungan listrik gratis pada pelanggan rumah tangga sederhana (RTS) karena akan menjadi beban finansial PT PLN (Persero).
6. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung upaya PT PLN (Perseo) untuk meningkatkan *reserve margin* dengan melakukan pembangunan PLTMH, PLTG dan PLTGU (*dual firing*) mengingat Papua Barat merupakan daerah penghasil gas
7. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung upaya Pemerintah dalam pengembangan potensi migas di daerah perbatasan Papua-Papua Nugini.
8. Tim Kunker Komisi VII DPR RI mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan efisiensi biaya angkut dan pemanfaatan energi migas di Indonesia timur dengan membangun *integrated shorebase* di antara Sorong dan Bintuni.

B. Rekomendasi

1. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan kunjungan spesifik ke Kilang Mini Kasim dengan kapasitas terpasang 10.000 BOPD guna mendorong Pemerintah melakukan revitalisasi dan optimalisasi kilang tersebut agar pendistribusian BBM di wilayah Indonesia Timur lebih efektif, efisien dan terjamin pasokanya.
2. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan Raker dengan Menteri ESDM dan RDP dengan Dirut PT Pertamina (persero) terkait persoalan BBM, perlunya revitalisasi dan optimalisasi kilang mini Kasim 10.000 BOPD serta persoalan ketenagalistrikan
3. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan RDP dengan Kepala SKK Migas terkait peningkatan lifting migas dan potensi pengembangan WK di perbatasan.
4. Tim Kunker Komisi VII DPR RI merekomendasikan agar dilakukan RDP dengan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM dan Dirut PT PLN (persero) terkait RTS dan persoalan kelistrikan lainnya.

C. PENUTUP

Demikian Laporan tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Papua Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 - 20 Desember 2016. Laporan ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan masukan bagi Komisi VII DPR RI untuk berperan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh Provinsi Papua Barat, khususnya di bidang pengelolaan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup serta riset dan teknologi.

Jakarta, Desember 2016
Tim Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI
Ketua Tim,

H. HADI MULYADI, S.Si, M.Si

Pengembangan sektor migas (eksplorasi) di daerah frontier di Papua Barat terkendala karena keberadaanya di daerah kehutanan (hutan konservasi dan hutan lindung).

Harapannya ada koordinasi antara Kementerian ESDM-SKK Migas dengan KLHK sehingga potensi migas eksploitasinya dapat diakselerasi guna menopang suksesnya BBM satu harga.